



KPU Jogja Tolak Honor Lembur

Jadi Hemat Dana Hibah APBD

JOGJA - Kekhawatiran penambahan APBD untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Jogja 2017, tak akan terealisasi. Ini setelah KPU Kota Jogja menggaransi tak akan menambah rencana anggaran yang telah ditetapkan Rp 14,9 miliar di APBD 2016.

Menurut Komisiner KPU Kota Jogja Sri Surani, beberapa anggaran yang telah ditetapkan dan

memungkinkan ditambah, tak akan diubah. Beberapa anggaran yang diperbolehkan ditambah berdasar SK KPU RI Nomor 43-44 Tahun 2016 tentang Standarisasi Kebutuhan Pilwali itu, adalah honor.

"Kami (komisiner KPU) sudah sepakat untuk tidak menambah honor selain dari KPU RI," kata Sri Surani, disela peringatan Hari Buruh Internasional, kemarin (1/5).

Perempuan yang akrab disapa Rani menegaskan, selain honor lembur, di SK tersebut juga memper-

provinsi memberikan standarisasi anggaran untuk tim adhoc. Dari perencanaan KPU Kota Jogja, honor bagi kelompok kerja (pokja) atau tim adhoc ditentukan Rp 1,3 juta.

"Kami sesuaikan dengan UMK (Upah Minimum Kota). Meski sebenarnya di SK itu mencapai Rp 2 juta," tuturnya.

Untuk perubahan rencana anggaran hibah, lanjut Rani, KPU Kota Jogja hanya mengubah beberapa poin saja. Terutama anggaran yang melebihi dari standar be-

lanja di SK.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono menegaskan, Pemkot tak akan permasalahan perubahan perencanaan itu. Asalkan, sesuai dengan ketentuan standar tersebut. "Lebih hemat lebih bagus," kelakarnya.

Kendati demikian, sambung Kadri, Pemkot secara prinsip menunggu perubahan perencanaan itu. Agar, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah

Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilwali segera bisa dilakukan.

"Sejak Maret lalu, kepala daerah sudah siap untuk tanda tangan NPHD," tambah Kadri.

Jika sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 terkait tahapan pilkada serentak 2017, NPHD sudah harus ditandatangani maksimal 22 Mei. Artinya, untuk perubahan menyesuaikan SK dari KPU RI itu masih ada waktu. "Kami menunggu dari pengguna (KPU)," tandas Kadri. (eri/dem/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005